



Volume X, Nomor 2, Mei 2016

ISSN 1978-1474

ANALISIS EKONOMI UTAMA

UTAMA

JURNAL EKONOMI KEUANGAN DAN MANAJEMEN

**PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN DIKLAT TERHADAP KINERJA
DOSEN UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

M.Asbullah

**PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP KELAYAKAN DAN KEAMANAN
AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN BOGOR**

Imelda Barus

**PERAN PENTING ETIKA BISNIS BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
INDONESIA DALAM BERSAING DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Jeffry H. Sinaulan

**PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENUNJANG EFEKTIVITAS FUNGSI
KEPEGAWAIAN PADA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI**

Hj. Misrofingah

KOMPUTER DALAM LOGIKA MANUAL Mencari Hari

Mustaqim

**EFEKTIFITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT. INDOGRAVURE**

Sentosa Bangun

PENGLOLAHAN MODAL KERJA DALAM KEGIATAN BISNIS

Sri Sugiarti

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER
AKUNTANSI FIRAGO COLLEGE CENTRE DI JAKARTA**

Yoga Fortuna

**STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN
WISATA DKI JAKARTA**

Nurlela Ginting

ALAMAT REDAKSI:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530
Telp.(021) 7890965-66
Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id
lppm_utama@yahoo.com
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

Volume X, Nomor 2, Mei 2016

ISSN 1978-1474

ANALISIS EKONOMI UTAMA

Pelindung:

Rektor

Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Penanggung jawab:

Dekan Fakultas Ekonomi

DEWAN REDAKSI

Ketua Dewan Redaksi:

Ketua LPPM UTAMA

Wakil Ketua Dewan Redaksi:

Wakil Ketua LPPM UTAMA

Anggota Dewan Redaksi:

Dr. H.M. Noor Sembiring, S.E., M.M

Dr. H. Rahmat Sembiring, S.E, M.M

Dr. H. M. R. Ulung Sembiring S.E., M.M.

Budi Akhmad Tarigan, S.E., M.M (UTAMA)

Dr. F.X.Soewarto ,S.E, M.S (Univ. Atmajaya Yogyakarta)

Dr. Wilson Bangun, M.M (Univ. Maranatha Bandung)

Dr. Agus Zainul Arifin, M.Sc (UNTAR)

Prof. Dr. J.H. Sinaulan, S.E, S.H (UTAMA)

Prof. Drs. NFH Ginting, S.H, M.M

Dr. Firmanta Sebayang, S.E, M.M

Redaksi Pelaksana:

H. Hamidullah Mahmud, Lc, MA

Wati Rosmawati, S.E., M.M.

Budi Akhmad Tarigan, S.E., M.M

Yoga Fortuna, S.E, M.M

Swasta Bangun, S.E., M.M.

Penerbit:

Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>



Volume VII, Nomor 2, Mei 2016

ISSN 1978-1474

ANALISIS EKONOMI UTAMA

JURNAL EKONOMI KEUANGAN DAN MANAJEMEN

**PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN DIKLAT TERHADAP KINERJA DOSEN
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

M.Asbullah.....1 - 8

**PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP KELAYAKAN DAN KEAMANAN
AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN BOGOR**

Imelda Baru 9 - 18

**PERAN PENTING ETIKA BISNIS BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDONESIA
DALAM BERSAING DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Jeffry H. Sinaulan..... 19 - 32

**PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENUNJANG EFEKTIVITAS FUNGSI
KEPEGAWAIAN PADA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI**

Hj. Misrofingah..... 33 - 46

KOMPUTER DALAM LOGIKA MANUAL Mencari Hari

Mustaqim..... 47 - 56

**EFEKTIFITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT. INDOGRAVURE**

Sentosa Bangun..... 57 - 68

PENGLOLAHAN MODAL KERJA DALAM KEGIATAN BISNIS

Sri Sugiarti.....69 - 80

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER AKUNTANSI FIRAGO
COLLEGE CENTRE DI JAKARTA**

Yoga Fortuna.....81 - 88

**STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATA
DKI JAKARTA**

Nurlela Ginting.....89- 98

ALAMAT REDAKSI:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530
Telp.(021) 7890965-66
Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

PERAN PENTING ETIKA BISNIS BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDONESIA DALAM BERSAING DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Oleh:

Jeffry H. Sinaulan

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa)

Abstract

Indonesia should see the MEA as an open opportunity to improve the quality of existing human resources to improve the competitiveness, provide adequate education and health, and provide education on the importance of the ASEAN Economic Community in 2016. MEA or commonly abbreviated as MEA in a nutshell could be interpreted as a form of integration ASEAN economies, which means all the countries located area of Southeast Asia (ASEAN) introduced a system of free trade. Indonesia and all other ASEAN countries (9 countries) have agreed on the MEA agreement or which in English is ASEAN Economy Community or AEC. Potential disputes or business disputes are sure to occur. To avoid this, business ethics should be run. When doing business, a culture of honesty and volunteered to be implanted. In addition, business ethics can also be standards and guidelines for all employees, including management and making it as a guide for carrying out their daily work with based on moral honest, transparent and professional manner. To perform an activity in the era of free competition this MEA, moral and ethical issues must be enforced to control the progress of the business and the application of technology for humanity. Then it is also desirable actions (behavior) Ethical which is the best long-term entrepreneurial strategy for the company.

Keywords: business ethics , guidelines , moral honest and MEA.

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah.

Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis dilakukan oleh manusia dengan manusia yang berarti norma atau nilai-nilai yang baik terbawa dalam kehidupan bisnis. Dalam praktik seorang pebisnis lebih suka menggunakan / berhubungan dengan perusahaan yang baik kualitasnya dalam segala aspeknya. Bisnis merupakan proses negosiasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang bermotif untuk mendapat keuntungan. Dalam beberapa tahun ini dunia ekonomi

berkembang sangat pesat dan bersifat modern. Perkembangan ekonomi yang sangat pesat tentunya memiliki faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh pelaku ekonomi. Dalam perusahaan dibutuhkan perencanaan jangka panjang dan strategi yang tepat untuk dapat bersaing dalam persaingan global yang sangat ketat saat ini. Apabila suatu perusahaan tidak melakukan perencanaan yang tepat, maka perusahaan tersebut akan berdampak kalah bersaing dengan perusahaan lain dan akan berdampak pada kebangkrutan. Maka dalam hal ini perusahaan harus pintar dan cermat dalam

memilih strategi sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Walaupun perencanaan dan menentukan strategi yang tepat merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam perusahaan untuk dapat bersaing dalam perkembangan ekonomi saat ini, ada hal yang harus perlu diingat oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonominya yaitu masalah “etika”. Hal tersebut juga harus diperhatikan oleh pihak perusahaan dalam melakukan kegiatan penjualan kepada konsumen. Banyak perusahaan yang tidak memperhatikan masalah beretika dalam kegiatan bisnisnya. Etika sangatlah penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Etika sangatlah penting dalam mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi produk yang dijual oleh perusahaan. Tentunya hal tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh perusahaan diperoleh dari jumlah tingkat penjualan produk tersebut. Semakin banyak pendapatan yang diterima oleh perusahaan maka akan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut dan menjauhkan dari dampak pada kebangkrutan.

Etika dalam berbisnis harus tetap dijaga oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Apabila perusahaan tersebut tetap menjaga etika dalam melakukan proses produksi maupun penjualan produknya maka produk yang dijual akan diterima oleh konsumen selaku pihak terakhir yang membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Konsumen tentunya memilih produk untuk dikonsumsi yang ekonomis dan higienis. Sesuai dengan permintaan konsumen, maka perusahaan selaku

produsen harus melihat apa yang diinginkan konsumen jika ingin produk tersebut diterima oleh konsumen. Tentunya masyarakat selaku konsumen lebih memilih produk yang tidak terlalu mahal dan cenderung murah. Namun selain harganya yang terjangkau konsumen juga memperhatikan tingkat kebersihan serta asal usul apa yang mereka konsumsi. Masyarakat tentunya tidak hanya memperhatikan harganya murah, jadi faktor higienis juga harus diperhatikan agar tidak mengganggu kesehatannya.

Tingkat higienis dari produk yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan. Namun pada kenyataannya masih ada perusahaan yang melakukan pelanggaran etika dengan menjual produk yang memiliki kandungan yang berbahaya bagi konsumen untuk dikonsumsi. Konsumen yang tidak mengetahui kandungan berbahaya pada produk yang mereka beli tentunya sangat merugikan dalam kesehatan konsumen itu sendiri. Konsumen juga harus pintar dan cerdas dalam memilih produk yang akan mereka beli atau untuk dikonsumsi sendiri yakni mana produk yang higienis dan mana produk yang tidak higienis. Dalam hal ini peran etika sangatlah penting dalam berbisnis sehingga tidak ada pihak akan dirugikan. Bisnis yang baik harus beretika dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsinya, baik secara besar (makro) maupun kecil (mikro). Belakangan ini banyak kasus pelanggaran etika dalam berbisnis, hal ini perlu dibenahi agar tatanan perekonomian Negara semakin membaik.

Untuk mencapai hal tersebut maka dalam menjalankan bisnis, salah satu yang terpenting untuk diperhatikan adalah etika berbisnis. Karena seperti yang kita

ketahui, bisnis juga memiliki berbagai norma atau etika yang harus dijalankan oleh pelakunya, baik antara sesama pelaku bisnis maupun terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Berlakunya MEA tentu akan menciptakan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi Indonesia, khususnya bagi pelaku dunia usaha, sehingga diperlukan kemampuan untuk meningkatkan daya saing melalui penciptaan produk dan jasa yang lebih kompetitif, dan mampu memenuhi dinamika kebutuhan pasar.

Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peranan yang sangat mempengaruhi perusahaan tersebut, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Maka disinilah kita akan mengetahui peran penting etika dalam berbisnis. Dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tersebut, etika bisnis menjadi poin penting yang wajib dipegang oleh semua perusahaan sebagai pelaku bisnis di Indonesia. Perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaatikan kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

MEA terwujud dari keinginan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan perekonomian yang solid dan dapat diperhitungkan dalam percaturan perekonomian Internasional. Bagi Indonesia, pembentukan MEA 2015 akan memberikan beberapa tantangan yang tidak hanya bersifat internal di dalam

negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan sesama negara ASEAN dan Negara lain di luar ASEAN seperti China dan India.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini memiliki rumusan dan batasan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa pentingkah peran etika bisnis bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam menjalankan bisnisnya di era MEA.
2. Strategi apa yang diterapkan pelaku bisnis (perusahaan) Indonesia dalam Menghadapi MEA.
3. Sejauh mana persiapan Indonesia dalam menghadapi era MEA.

1.3 Tujuan penelitian

Dalam penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa penting peran etika bisnis bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam menjalankan bisnisnya di era MEA.
2. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan pelaku bisnis (perusahaan) Indonesia dalam Menghadapi MEA
3. Sejauh mana persiapan Indonesia dalam menghadapi era MEA.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menyusun jurnal ilmiah ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui media perantara. Seperti buku-buku literatur, surat kabar, majalah, dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik Pengumpulan Datanya menggunakan Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku literatur dan bacaan-bacaan lain yang dapat membantu dalam pemecahan masalah.

2. PEMBAHASAN

2.1 Seberapa pentingkah peran etika bisnis bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam menjalankan bisnisnya di era MEA.

Dunia bisnis menjelaskan etika sebagai konsep dan prinsip dasar dari perilaku manusia yang tepat. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar dan adil. Sedangkan menurut Griffin, Etika adalah pandangan, keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Etika sebagai Ilmu menuntut orang untuk berperilaku moral secara kritis dan rasional. Yang dipertaruhkan dalam bisnis uang dan barang material, tidak cukup itu, tetapi “dipertaruhkan dirinya, nama baiknya, keluarga, hidupnya, karyawan dan keluarganya, dan nasib umat manusia”.

Bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika dalam perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya misalnya, dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat, kemudian etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan

mengatur hubungan antar karyawan. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Pada dasarnya, etika membahas tentang tingkah laku

manusia. Dengan kata lain, etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia.

Dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA yakni Desember 2015, etika bisnis berperan penting dan harus dipegang oleh semua pelaku bisnis di Indonesia. Karena tanpa adanya etika bisnis, penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan maupun di luar pengadilan atau arbitrase akan menjadi sia-sia. Menghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) 2015, etika bisnis perlu dijunjung. Semua Negara yang terlibat dalam pakta perdagangan di kawasan Asia Tenggara itu wajib menaati.

MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Atau pengertian bahasa Internasional dari *ASEAN Economic Community* yaitu merupakan sebuah kesepakatan dari negara-negara yang masuk dalam anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan perkembangan dalam bidang perekonomian seperti bidang perdagangan dan jasa yang telah di berlakukan mulai tanggal 31 Desember 2015. Bentuk kerja sama MEA ini dapat memberikan berbagai peluang bagi pelaku bisnis atau pelaku usaha agar dapat tercipta aliran bebas dalam rangka jual beli. Baik itu perdagangan barang, bidang jasa dan bebas nya pengambilan tenaga kerja yang terlatih atau profesional. Negara kita Indonesia turut serta dalam meramaikan pasar MEA yaitu masyarakat Ekonomi ASEAN yang sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat agar lebih mandiri dalam meningkatkan perekonomian dan lebih memajukan dalam mencari potensi dan peluang untuk mendapatkan pasar yang lebih besar bagi para pelaku usaha, karena pasarnya telah menyangkut lebih dari satu negara. Sehingga potensi penjualan bisa lebih besar. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha guna mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015, serta

harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.

Dalam berbisnis, budaya jujur dan sukarela harus ditanamkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut hingga kini tidak banyak dijalankan pelaku usaha sehingga dapat menimbulkan sengketa-sengketa bisnis. Setiap perusahaan harus meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Bahkan etika bisnis ini pula dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang jujur, transparan dan sikap yang profesional. Bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal

untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia:

Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil

Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota di dalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul

tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini *competition risk* (risiko persaingan) akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Etika bisnis dalam perusahaan mempunyai peran penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (*value-creation*) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Di Indonesia tampaknya masalah penerapan etika perusahaan yang lebih intensif masih belum dilakukan dan digerakan secara nyata. Pada umumnya baru sampai tahap pernyataan-pernyataan atau sekedar "*lips-service*" belaka. Karena memang *enforcement* dari pemerintah pun belum tampak secara jelas. Praktek penerapan etika bisnis yang paling sering kita jumpai pada umumnya diwujudkan dalam bentuk buku saku "*code of conducts*" atau kode etik dimasing-masing perusahaan. Hal ini barulah merupakan tahap awal dari praktek etika bisnis yakni mengkodifikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis bersama-sama *corporate-culture* atau budaya perusahaan, kedalam suatu bentuk pernyataan tertulis dari perusahaan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh manajemen dan karyawan dalam melakukan kegiatan bisnis. Etika bisnis

adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (*fairness*), sesuai dengan hukum yang berlaku (*legal*) tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan "*grey-area*" yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Tindakan yang tidak etis, bagi perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontra produktif, misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika pada umumnya perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis misalnya diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang karier. Oleh sebab itu, maka kesadaran tentang pentingnya memperhatikan kesiapan MEA 2015 adalah merupakan suatu kewajiban yang utama, karena jika tidak diantisipasi dan tidak dipersiapkan maka MEA 2015 berpotensi menciptakan instabilitas terhadap perekonomian nasional, bahkan secara *step by step* dapat merupakan ajang pengambilan aset-aset ekonomi penting milik negara tercinta ini.

Di Indonesia, masalah penegakan etika bisnis dalam persaingan bisnis semakin berat. Kondisi ini semakin sulit dan

kompleks, karena banyaknya pelanggaran terhadap etika bisnis oleh para pelaku bisnis itu sendiri, sedangkan pelanggaran etika bisnis tersebut tidak dapat diselesaikan melalui hukum karena sifatnya yang tidak terikat menurut hukum. Persaingan usaha yang sehat tentunya akan menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen. Indikator dari persaingan yang sehat adalah tersedianya banyak produsen, harga pasar yang terbentuk antara permintaan dan penawaran pasar, dan peluang yang sama dari setiap usaha dalam bidang industri dan perdagangan. Adanya persaingan yang sehat dapat menguntungkan semua pihak termasuk konsumen dan pengusaha kecil, dan produsen sendiri, karena akan menghindari terjadinya konsentrasi kekuatan pada satu atau beberapa usaha tertentu. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar-salah, baik-buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat aturan-aturan moral yang dibuat untuk dipatuhi guna kelangsungan hidup suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan yang telah diharapkan. Bisnis yang beretika akan menjadi ciri karakter seorang wirausaha sejati yang selalu mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam bisnisnya. Dalam keadaan darurat tetap mampu berdiri atas kemampuan sendiri, mampu menolong dirinya keluar dari kesulitan, mampu mengatasi kemiskinan tanpa bantuan pemerintah dan biasanya mereka dalam keadaan normal mampu menjadikan dirinya maju, kaya dan berhasil dengan kemampuan dan kapasitas dirinya. Guna menjaga etika dalam berwirausaha adalah dengan menanamkan norma dan nilai-nilai yang mendukung

usahanya untuk mendapatkan kepercayaan pasar atau pelanggan maupun menjadi tauladan (bisnis model) dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, selalu berupaya menepati janji, melakukan disiplin diri, taat hukum, suka membantu dan bermanfaat untuk orang lain, menjaga amanah/komitmen, mau menghormati semua orang serta selalu mengejar prestasi (kesuksesan usaha yang berkah).

Pelanggaran etika bisnis bisa terjadi pada setiap pelaku bisnis atau perusahaan. Dengan alasan menghasilkan keuntungan yang maksimal dan produk yang ditawarkan dapat diterima oleh masyarakat, pelaku bisnis kerap menghalalkan segala cara. Pelaku bisnis dan perusahaan menengah ke bawah yang dirugikan dalam pelanggaran etika bisnis tersebut karena kurangnya kemampuan yang mereka miliki. Kegiatan bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik itu adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral.

2.2 Strategi apa yang diterapkan pelaku bisnis (perusahaan) Indonesia dalam Menghadapi MEA.

Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA / AEC, antara lain :

1. Penguatan Daya Saing Ekonomi. Pada 27 Mei 2011, Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat,

- inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan Groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur.
2. Program ACI (Aku Cinta Indonesia). ACI (Aku Cinta Indonesia) merupakan salah satu gerakan 'Nation Branding' bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementerian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam Kemendag RI : 2009:17).
 3. Penguatan Sektor UMKM. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah 'Pameran Koperasi dan UKM Festival' pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah. Disamping itu, persiapan Indonesia dari sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) guna menghadapi MEA 2015 yaitu

pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015. Maka langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku KUKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan sebagai berikut wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Tetapi, salah satu faktor hambatan utama bagi sektor Koperasi dan UKM untuk bersaing dalam era pasar bebas ini yakni kualitas sumber daya manusia pelaku KUKM yang secara umum masih rendah (minim). Oleh karena itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pemberdayaan KUKM yang di arahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja KUKM untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Disamping itu, pihak Kementerian Perindustrian juga tengah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UMKM. Penguatan IKM tersebut berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan

melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk diekspor. Selain itu, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan kementerian pun terus ditingkatkan sehingga faktor penghambat dapat dieliminir.

4. Perbaikan Infrastruktur. Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan seperti: Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi, Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK, Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi Listrik.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Salah satu jalan guna meningkatkan kualitas SDM yaitu melalui jalur pendidikan. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:36).
6. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan. Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, kemudian menggunakan sistem prosedur yang transparan dan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Etika bisnis yang baik dalam perusahaan dapat menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yakni dikarenakan:

- a. Mampu meningkatkan keunggulan bersaing.
- b. Mampu meningkatkan motivasi pekerja.
- c. Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik intern perusahaan maupun eksternal.
- d. Melindungi prinsip kebebasan berniaga.

Namun kiranya tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan yang non etis yang dilakukan oleh perusahaan akan dapat memancing (mempengaruhi) tindakan

balasan dari konsumen (masyarakat) sehingga akan kontra produktif, yakni misalnya, dengan melakukan gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi atau sebagainya. Tentunya hal ini dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Namun pada perusahaan yang menjunjung selalu tinggi nilai etika bisnisnya ini termasuk perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis. seperti diskriminasi dalam sistem jenjang karier.

2.3 Sejauh mana persiapan Indonesia dalam menghadapi era MEA

Indonesia harus melihat MEA sebagai peluang yang terbuka untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada dengan meningkatkan daya saing, menyediakan pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta memberikan edukasi terhadap pentingnya MEA 2015. Pemerintah Indonesia harus mampu mendorong diadakan pelatihan keterampilan karena mayoritas tenaga kerja Indonesia kurang dalam kecerdasan sikap, kemampuan berbahasa Inggris dan pengoperasian komputer. Walaupun peran yang dominan dalam meningkatkan kualitas tersebut di atas menjadi milik pemerintah, bukan berarti seluruh tanggung jawab berada di tangan pemerintah. Maka dalam hal ini sangat diperlukam adanya kesadaran bahwa dampak (pengaruh) dari MEA ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan masyarakat juga dapat untuk berpartisipasi dan mempersiapkan diri menjelang 2015. Hadirnya MEA ini dapat

diketahui yakni dari ciri khas lintas barang, jasa, investasi modal, dan tenaga terdidik yang bebas dan tidak mengenal batas negara. Jika hal ini terkait barang, maka tidak ada bea masuk dan tidak ada izin kerja untuk tenaga kerja asing, sehingga MEA membuka peluang untuk semua negara bisa berinvestasi di mana saja, peluang setiap negara sama besarnya. Menurut Rektor Universitas Pelita Harapan (UPH) Surabaya, Prof Adrianus Mooy seorang ahli ekonomi yang menegaskan bahwa tantangan untuk Indonesia pada MEA lebih besar daripada negara lain. Karena Indonesia merupakan pasar yang paling besar dibandingkan negara lain. Semua orang berlomba datang ke Indonesia. Jika dibandingkan dengan Singapura, tidak mungkin semua negara berlomba-lomba ke negara tersebut karena pasarnya kecil, sehingga untuk Indonesia banyak serangan yang datang menghampiri. Penulis sependapat dengan ahli ekonomi tersebut yang mengatakan bahwa “Jika MEA hanya untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri, maka tidak perlu harus terlibat”. Hal ini menurut pandangan penulis, memang negara kita yakni Indonesia haruslah mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari negara-negara lainnya. Disamping itu juga mengenai ketidaksiapan menghadapi era baru itu muncul dari pelaku usaha yang kurang matang dalam mempersiapkannya. Di satu pihak yaitu, pemerintah masih dianggap kurang gencar dalam memberikan informasi tentang MEA ini. Tidak sedikit, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah kurang paham, bahkan tidak mengerti apa itu MEA.

Jika untuk berkompetisi maka yang diharuskan adalah bisa mempertahankan serta melakukan persiapan yang lebih

unggul dari negara lain di berbagai hal. Salah satunya produk, karena produk menjadi faktor penentu kualitas ataupun mutu dari barang tertentu. Hal lain adalah harga, sebab konsumen tentu mengincar barang yang mutunya baik dan murah. Perlu kita berikan dukungan dan apresiasi kepada pemerintah yakni dimana pemerintah telah melakukan sejumlah upaya dalam hal guna meningkatkan kesiapan dan kompetensi pekerja lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Upaya itu antara lain menetapkan 85 Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta akreditasi 725 Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Disamping itu, pemerintah juga telah melakukan pelatihan wirausaha dan keterampilan kerja bagi 717.454 calon tenaga kerja dan melakukan sertifikasi terhadap 167 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai kesiapan menghadapi MEA. Penulis berkesimpulan bahwa memang benar bahwa dalam pelaksanaan pasar tunggal ASEAN ini, kesiapan tenaga kerja memang menjadi perhatian penting. Kerjasama antara dunia usaha, pekerja, serta pemerintah harus terus dikompakkan untuk meningkatkan daya saing pekerja Indonesia. Disamping itu juga, masih ditemukan banyak kelemahan Indonesia dalam menghadapi MEA yakni dimana yang menjadi kendala tersebut adalah terutama dalam daya saing produk dari sisi kualitas. Ada juga faktor ekonomi karena biaya tinggi karena dan infrastruktur. Kemudian, semakin maraknya korupsi, faktor perizinan, dan lain sebagainya ikut melemahkan Indonesia. Banyak kendala yang masih perlu dibenahi untuk memperkuat industri dalam negeri sehingga mampu meningkatkan daya saing. Kita semua tentunya berharap agar

negara kita ini harus siap dan dapat menghadapi kehadiran MEA ini dengan tetap menjunjung nilai-nilai etika dalam berbisnisnya.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berlakunya MEA tentu akan menciptakan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi Indonesia, khususnya bagi pelaku dunia usaha, sehingga diperlukan kemampuan untuk meningkatkan daya saing melalui penciptaan produk dan jasa yang lebih kompetitif, dan mampu memenuhi dinamika kebutuhan pasar. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Etika bisnis dalam perusahaan mempunyai peran penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Di Indonesia tampaknya masalah penerapan etika perusahaan yang lebih intensif masih belum dilakukan dan digerakan secara nyata. Pada umumnya baru sampai tahap pernyataan-pernyataan atau sekedar “lips-service” belaka. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA / AEC, antara lain Penguatan Daya Saing Ekonomi; Program ACI (Aku Cinta Indonesia); Penguatan Sektor UMKM; Perbaikan Infrastruktur; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi MEA ini antara lain

menetapkan 85 standard kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) serta akreditasi 725 balai latihan kerja dan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS); telah melakukan pelatihan wirausaha dan keterampilan kerja bagi 717.454 calon tenaga kerja dan melakukan sertifikasi terhadap 167 lembaga sertifikasi profesi (LSP) sebagai kesiapan menghadapi MEA; harus dapat meningkatkan daya saing pekerja Indonesia agar bisa memenangkan persaingan di tingkat ASEAN dan Internasional; Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan seluruh stakeholder dan melakukan sinergi untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja Indonesia; juga telah melakukan pelatihan wirausaha dan keterampilan kerja bagi 717.454 calon tenaga kerja dan melakukan sertifikasi terhadap 167 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai kesiapan menghadapi MEA.

3.2 Saran

Indonesia adalah salah satu negara terbesar populasinya yang ada di kawasan ASEAN. Bagi Indonesia, keberadaan MEA ini menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2016. MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Indonesia harus melihat MEA sebagai peluang yang terbuka untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada dengan meningkatkan daya saing, menyediakan pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan

memberikan edukasi terhadap pentingnya MEA 2016.

Kita semua tentunya berharap agar negara kita ini harus siap dan dapat menghadapi kehadiran MEA ini dengan tetap menjunjung nilai-nilai etika dalam berbisnis. Dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Desember 2015, etika bisnis menjadi poin penting yang wajib dipegang semua pelaku usaha. Tanpa adanya etika bisnis, penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan maupun di luar pengadilan atau arbitrase akan sia-sia saja. Hendaknya dalam berbisnis tersebut budaya jujur dan sukarela harus ditanamkan. Perusahaan-perusahaan juga harus selalu meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun peran dominan dalam meningkatkan kualitas menjadi milik pemerintah, bukan berarti seluruh tanggung jawab berada di tangan pemerintah. Justru sebaliknya, perlu kesadaran bahwa efek dari MEA akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mempersiapkan diri menjelang 2016 menjadi milik bersama.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.antaraneews.com/berita/436319/kesiapan-koperasi-ukm-indonesia-menatap-era-mea-2015>.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2009, "Menuju ASEAN Economic Community 2015", Jakarta.

KPPN/Bappenas.2012.”Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013”.Buku I.

KPPN/Bappenas.2013.”Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013”.Buku II.

Sholeh. 2013. “Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015”. eJournal

Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522.

Association of Southeast ASIAN Nations (2008). ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT. Jakarta: Asean Secretariat.

<http://www.beritasatu.com/figur/346239-era-mea-cek-lagi-kesiapan-indonesia.html>